

Perempuan & Pandemi Covid-19

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan & Pandemi Covid-19

Artikel

Perspektif Feminisme: Interseksionalitas dan Covid-19

Gadis Arivia

Dari Kehilangan ke ketahanan: Studi atas Pengalaman Perempuan Sumba dalam Penanganan Covid-19

Meylani Yo & Pupu Purwaningsih

Beberapa Pengalaman Perempuan Indonesia dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19

Alimatul Qibtiyah

Mempertahankan Ruang Kewargaan: Perempuan Aktivis dan Politik Spasial di Masa Pandemi Covid-19

Robertus Robet, Retna Hanani & Charine

Urgensi Perspektif Gender dalam Mitigasi Pandemi Covid-19

Misiyah

Gerakan Perempuan Ulama Merespons Pandemi Covid-19 di Tengah Komunitas: Pengalaman Simpul Rahima

Andi Nur Faizah

Potret Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 terhadap

Perempuan dan Kelompok Marginal melalui Pendekatan Feminisme Interseksional

Atnike Nova Sigiro, Abby Gina & Dewi Komalasari

Diterbitkan oleh:

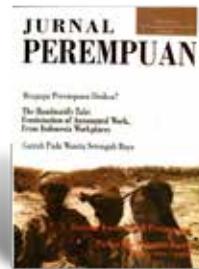


Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroplah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminism. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan mengimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- **Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia**

No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah

(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

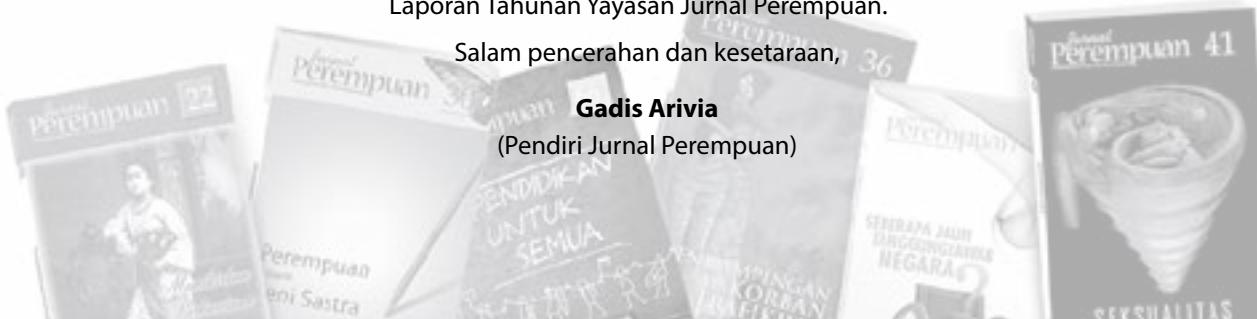
Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam

Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Rooseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Rooseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Twon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, Ph.D (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)

Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiantini, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)

Elisabet Kuswijayanti (Ekologi dan Gender)

Fransicia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminism, Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

Abby Gina Boangmanalu

Dewi Komalasari

Octania Wynn

Agnes Diana Wahyuni

Hendrik Bolitobi

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah

Gery Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN :

Andri Wibowo/Gery : 0813 1869 2350 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Tanah Manisan No. 72 RT 07 / RW 03

Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara

Jakarta Timur

Telp: (+62) 812 1098 3075

E-mail : yjp@jurnalperempuan.com

redaksi@jurnalperempuan.com

Twitter : @jurnalperempuan

Facebook : Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org

www.indonesifefeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2020

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

- Perempuan dan Pandemi Covid-19/*Woman and Covid-19 Pandemic* iii-iv
Atnike Nova Sigiro

Artikel

- Perspektif Feminisme: Interseksionalitas dan Covid-19/
Feminist Theoretical Perspective: Intersectionality and Covid-19 221-231
Gadis Arivia
- Dari Kehilangan ke Ketahanan: Studi atas Pengalaman Perempuan Sumba dalam Penanganan COVID-19/
From Loss to Survival: A study on the Sumbanese Women's Experiences during Covid-19 Mitigation 233-246
Meylani Yo & Pupu Purwaningsih
- Beberapa Pengalaman Perempuan Indonesia dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19/
Indonesian Women's Experiences in Dealing with the Impacts of Pandemic Covid-19 247-257
Alimatul Qibtiyah
- Mempertahankan Ruang Kewargaan: Perempuan Aktivis dan Politik Spasial di Masa Pandemi Covid-19/
Maintaining Civic Space: Women Activist and Spatial Politics During Pandemic Covid-19 in Indonesia 259-269
Robertus Robet, Retna Hanani & Charine Misiyah
- Urgensi Perspektif Gender dalam Mitigasi Pandemi Covid-19/
The Urgency of Gender Perspectives in the Covid-19 Pandemic's Mitigation 271-282
Misiyah
- Gerakan Perempuan Ulama Merespons Pandemi Covid-19 di Tengah Komunitas:
Pengalaman Simpul Rahima/
Female Ulema's Action Responding to Covid-19 Pandemic in their Communities:
The Experience of 'Simpul Rahima' 283-294
Andi Nur Faizah
- Potret Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perempuan dan Kelompok Marginal melalui Pendekatan Feminisme Interseksional/
Portrait of the Impact of the Implementation of Large-Scale Social Distancing during Covid-19 Pandemic towards Women and Marginalized Groups through the Perspective of Intersectional Feminism 295-308
Atnike Nova Sigiro, Abby Gina & Dewi Komalasari

Perempuan dan Pandemi Covid-19

Woman and Covid-19 Pandemic

Ketimpangan gender di dalam masyarakat dinilai turut memperburuk dampak Pandemi Covid-19 terhadap perempuan. *Rapid Gender Assessment* (RGA) oleh UN Women di Eropa dan Sentral Asia menemukan lebih dari 15 persen perempuan kehilangan pekerjaan, 41 persen perempuan mengalami pengurangan upah, dan menemukan terjadinya peningkatan jam dan beban kerja perempuan di dalam keluarga, selama pandemi Covid-19. Tak hanya dampak ekonomi dan sosial, pandemi Covid-19 juga menyebabkan meningkatnya kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Shadow pandemic* adalah konsep yang menjelaskan fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan selama pandemi Covid-19.

Keluarga sebagai '*gendered institution*' merupakan salah satu fokus penting dalam studi-studi feminism. Feminisme melihat keluarga di dalam masyarakat yang patriarkis sebagai wujud dari relasi gender yang timpang, di mana peran gender perempuan dikonstruksi dan ditempatkan secara subordinat. Dalam struktur masyarakat yang patriarkis, perempuan dilekatkan dengan peran produksi afektif-seksual (*sex-affective production*), yang bertugas memberikan pengasuhan emosional bagi anak dan laki-laki, serta kepuasan seksual bagi laki-laki. Sementara itu, kerja-kerja di dalam keluarga, seperti kerja pengasuhan (*carework*) atau kerja rumah tangga (*housework*), cenderung dianggap memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah, dan dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan.

Sejak bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan status pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan untuk mencegah meluasnya pandemi adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB merupakan kebijakan pembatasan jarak sosial (*social distancing*) yang mewajibkan pembatasan kegiatan di ruang publik seperti di kantor, pabrik, tempat hiburan, tempat ibadah, restoran, sekolah, pasar, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Pembatasan jarak sosial ini telah mengakibatkan kontraksi terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia. Maka pandemi Covid-19 kemudian dibayangi oleh ancaman PHK terhadap pekerja, serta hilangnya lapangan pekerjaan di berbagai jenis wira usaha dan/ atau sektor informal. Dampak ekonomi dari pandemi tidak hanya terjadi pada ekonomi makro tetapi juga terhadap perekonomian rumah tangga.

Analisis atas relasi gender yang timpang di dalam keluarga penting untuk memahami dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan. Penerapan pembatasan jarak sosial menyebabkan sebagian besar kegiatan di ruang publik harus dilakukan dari rumah. Sehingga di masa pandemi kita melihat munculnya berbagai bentuk kegiatan seperti: bekerja dari rumah (*work from home*), bersekolah jarak jauh, beribadah jarak jauh, termasuk berbelanja daring (*online shopping*). Terpusatnya berbagai kegiatan ke dalam rumah menyebabkan tanggung jawab perempuan di dalam rumah tangga semakin besar. Di masa pandemi, misalnya, seorang ibu yang bekerja (*working mother*) harus dapat mengatur beban dan waktu kerja antara bekerja dari rumah dengan mendampingi anak bersekolah daring. Di masa pandemi, seorang ibu rumah tangga juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dan biaya listrik yang naik, ketika pendapatan keluarga menurun.

Feminisme interseksional (*intersectional feminism*) merupakan sebuah konsep feminism yang penting untuk melihat perbedaan situasi yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok marginal di masa pandemi Covid-19. Secara umum beban rumah tangga yang membesar di masa pandemi tentu berdampak terhadap perempuan. Namun perempuan bukanlah entitas yang homogen. Di masa pandemi Covid-19, pekerja rumah tangga (PRT) - yang umumnya dilakukan oleh perempuan, merupakan salah satu profesi yang rentan mengalami eksplorasi. Meski beban kerja PRT di masa pandemi semakin besar, namun pada umumnya PRT tidak mendapatkan tambahan upah. Sebaliknya, selama pandemi PRT justru menjadi rentan terhadap PHK dan stigma sebagai penyebar virus Corona. PRT migran menghadapi kerentanan yang relatif sama dengan PRT di dalam negeri, selain juga rentan untuk dipulangkan kembali ke dalam negeri.

Feminisme interseksional juga dapat mengungkapkan marginalisasi berlapis yang dialami oleh kelompok marginal, seperti LGBT atau transgender. Karena identitas gendernya, kaum transgender memiliki akses terbatas untuk memperoleh pekerjaan di berbagai bidang. Selama penerapan PSBB, jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh kaum transgender, seperti salon kecantikan, pengamen, restoran, merupakan jenis pekerjaan yang banyak ditutup atau dibatasi. Di beberapa kasus, kaum transgender juga menghadapi hambatan akses terhadap

bantuan sosial karena tidak memiliki kartu penduduk. Sementara itu, akibat identitas gendernya, keluarga yang pada umumnya menjadi tumpuan perlindungan di masa pandemi, justru menjadi tempat yang rentan terjadi kekerasan terhadap kelompok transgender. Relasi sosial, ekonomi, dan politik yang timpang, membawa dampak pandemi yang lebih buruk terhadap kelompok yang mengalami ketimpangan berlapis. Kerentanan berlapis inilah yang dialami misalnya oleh kelompok transgender, perempuan dengan disabilitas, pekerja rumah tangga (PRT), perempuan nelayan, pekerja migran, dan lainnya, di masa pandemi Covid-19.

Meski berada dalam posisi subordinat, perempuan tetap memiliki agensi untuk bertahan di masa pandemi, bahkan untuk memberikan dukungan bagi komunitasnya. Perempuan Sumba, misalnya, mengembangkan inisiatif edukasi, pemberian informasi, dan komunikasi mengenai Covid-19, bagi komunitasnya. Agensi perempuan lainnya juga dapat dilihat dari kerelawanannya yang dilakukan oleh Solidaritas Pangan Jogja (SPJ). SPJ berhasil mentransformasi pandangan yang bias terhadap kerja perawatan, seperti memasak di dapur, menjadi gerakan solidaritas dapur umum bagi komunitas marginal di masa pandemi Covid-19.

Dalam ruang sosial yang terbatas di masa pandemi Covid-19, perempuan mampu mendorong aksi kolektif, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga menciptakan ruang bagi kepentingan publik. Pengalaman organisasi perempuan seperti Rahima dan 'Aisyiyah, memperlihatkan gerak kolektif perempuan untuk mendampingi komunitas melalui gerakan solidaritas bantuan dan pendidikan. Sementara itu, KAPAL Perempuan berusaha mengembangkan inisiatif solidaritas sambil tetap memerhatikan kekerasan berbasis gender yang tetap terjadi di masa pandemi,

seperti perkawinan anak. Selain mengatasi tekanan '*gendered space*' yang diakibatkan oleh pandemi, kaum perempuan juga mempertahankan politik kewargaan di ruang publik. Maka, meskipun ruang publik di masa pandemi Covid-19 semakin menyempit, namun para aktivis perempuan tetap turut mengawal politik kewargaan, seperti mendorong pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, mendorong pembahasan RUU Pekerja Rumah Tangga, serta terlibat dalam gerakan untuk mengkritik terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Jurnal Perempuan edisi ke-107 tentang Perempuan dan Pandemi Covid-19 kembali mengkonfirmasi temuan dan pengalaman perempuan di berbagai negara, bahwa di Indonesia pandemi Covid-19 juga membawa beban dan kerentanan lebih terhadap perempuan. Kelindan ketimpangan antara identitas gender, posisi kelas, status sosial, dan pandemi Covid-19, telah menyebabkan kerentanan berlapis terhadap perempuan dan kelompok marginal. Oleh sebab itu, penempatan perempuan secara substantif dalam penanganan pandemi Covid-19 diperlukan tidak hanya karena perempuan merupakan salah satu kelompok yang menghadapi kerentanan besar, tetapi juga karena perempuan merupakan tulang punggung dari proses pencegahan dan pemulihuan pandemi. Pengalaman agensi kaum perempuan mengajarkan bahwa pandemi Covid-19 tidak dapat diatasi dengan mendomestikasi persoalan-persoalan yang muncul. Di sini kita kembali diingatkan pada satu argumen yang berkembang di masa feminism gelombang kedua, bahwa pengalaman-pengalaman personal perempuan tidak dapat dilepaskan dari struktur politik yang bekerja di dalam masyarakat. Bahwa "*the personal is political*". Selamat membaca! (**Atnike Nova Sгиro**)

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Gadis Arivia

(Sociology, Anthropology and Criminal Justice Department,
Montgomery College, Takoma Park Campus, MD, USA 20912)

Perspektif Feminisme: Interseksionalitas dan Covid-19

Feminist Theoretical Perspective: Intersectionality and Covid-19

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, 2 hal. 221-231, 2 gambar, 16 daftar pustaka

The author argues for using a new theoretical foundation and criticizes Gender Mainstreaming perspective in issues related to gender. The author proposes an intersectionality approach that can critically see the problem of Covid-19 and its implications to not only gender relations (men and women) but also race, ethnicity, class, LGBTQIA, and other minority groups. The author emphasizes the concept of critical praxis, which uses both critical questions and activism for total social change.

Keywords: Covid-19, Intersectionality, Critical Praxis, Gender Mainstreaming, Male Crisis

Penulis berargumentasi untuk menggunakan landasan teori baru karena kegagalan perspektif Pengarusutamaan Gender dalam melihat persoalan terkait gender. Penulis mengajukan pendekatan interseksionalitas sebagai pendekatan yang mampu melihat persoalan COVID-19 dan implikasinya yang bukan hanya pada gender (laki-laki dan perempuan) tetapi juga pada ras, etnisitas, kelas, LGBTQIA dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Penulis menekankan konsep *critical praxis*, yaitu bukan saja menggunakan pertanyaan-pertanyaan kritis tetapi juga berpijak pada aktivisme untuk perubahan sosial secara total.

Kata kunci: Covid-19, Interseksionalitas, Praksis Kritis, Pengarusutamaan Gender, Maskulinitas

¹Meylani Yo, ²Pupu Purwaningsih

(¹Universitas Multimedia Nusantara & ²Independent Researcher
Jl. Scientia Boulevard, Gading, Kec. Serpong, Tangerang,
Banten 15227)

Dari Kehilangan Ke Ketahanan: Studi atas Pengalaman Perempuan Sumba dalam Penanganan COVID-19

From Loss to Survival: A study on the Sumbanese Women's Experiences during Covid-19 Mitigation

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 233-246, 37 daftar pustaka

This article describes the capacity of Sumbanese women to survive and adapt to the Covid-19 pandemic. Pandemic response creates problems due to changes in various aspects of life, such as health access patterns, social interaction and relationships, work patterns and employment status, religious practice, and school education system. To overcome the impact of pandemic response, they change their behavior and lifestyle, such as utilizing strategic partners in Covid-19-related education, participating as community volunteers, switching professions, and building social support among fellow community members. This study used a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, online focus group discussions, and online surveys.

Keywords: resilience, social relation, stigmatisation, Sumbanese women, Covid-19.

Artikel ini menggambarkan kemampuan kelompok rentan perempuan Sumba dalam bertahan dan beradaptasi menghadapi pandemi Covid-19. Pengendalian pandemi menimbulkan masalah karena adanya berbagai perubahan seperti yang terjadi pada pola akses pelayanan kesehatan, cara berinteraksi dan berelasi sosial, pola kerja dan status hubungan kerja, penghayatan iman, serta sistem pendidikan sekolah. Untuk mengatasi dampak pengendalian pandemi mereka mengubah perilaku dan pola hidup seperti memanfaatkan mitra strategis dalam sosialisasi covid-19, berpartisipasi sebagai relawan sosialisasi, beralih profesi, dan membangun dukungan sosial antar sesama anggota komunitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus secara daring, serta survei daring.

Kata kunci: ketahanan, relasi sosial, stigmatisasi, perempuan Sumba, Covid-19.

Alimatul Qibtiyah

(Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta; Komnas Perempuan; Jl. Laksda Adisucipto No. 1
Yogyakarta, Indonesia; Jl. Laturharhari 48B Menteng,
Jakarta Pusat, 10310 Indonesia)

Beberapa Pengalaman Perempuan Indonesia dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19

Indonesian Women's Experiences in Dealing with the Impacts of Pandemic Covid-19

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 247-257, 2 tabel,
32 daftar pustaka

The Covid-19 pandemic has brought serious impact due to its massive scale, that occur all over the world, at all levels of groups within society. This disaster has a strong social dimension because its vulnerabilities often intersects with the existing social stratification. In various disasters, women often become one of the most vulnerable to be affected, especially in the context of culture of patriarchy, that intertwine with misogynistic interpretations of religion, and the unfriendly economic and political system towards women. This article aim to identify the forms of the impacts Covid-19 pandemic on women, government's regulations that deal with these impacts, as well as women's efforts both as individual and in groups in dealing those impacts. This research was conducted through literature study over various researches by several institutions, also through observation and interviews with several women groups. The results of this study found that women are one of the most vulnerable and the most affected groups of Covid-19 Pandemic. Although rather delayed, government has included women in the decision-making in handling the situation of women, children and vulnerable groups during the pandemic. Women's experiences both as individual and groups in responding to the impact of pandemic also deserve some appreciation. This research found that during the pandemic, women have shown their resilience, creativity, and put forward women's collaboration.

Keywords: women and pandemic, Covid-19 pandemic, women resilience

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang sangat serius karena bersifat masif, terjadi di seluruh dunia, pada semua level di berbagai kelompok di dalam masyarakat. Bencana ini memiliki dimensi sosial yang kuat karena kerentanan yang muncul kerap beririsan dengan stratifikasi sosial yang ada. Dalam berbagai bencana, perempuan merupakan salah satu kelompok yang rentan terdampak, terutama dalam konteks budaya patriarki yang berkelindan dengan penafsiran agama yang misoginis, serta sistem ekonomi dan politik yang tidak

ramah pada perempuan. Tulisan ini berusaha untuk menemukan bentuk-bentuk dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan, peraturan negara yang dibuat untuk mengatasi dampak pandemi tersebut, serta upaya-upaya kaum perempuan baik secara individu ataupun kelompok dalam menghadapi pandemi. Riset ini dilakukan dengan teknik pengumpulan studi dokumen dari berbagai hasil riset beberapa lembaga, serta observasi dan wawancara pada beberapa kelompok perempuan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dan paling terdampak oleh Pandemi Covid-19. Walaupun agak terlambat, pemerintah telah melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait penanganan perempuan, anak dan kelompok rentan di masa pandemi. Pengalaman perempuan baik secara individu dan maupun kelompok dalam merespons dampak pandemi juga patut mendapatkan apresiasi. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan memiliki kelentongan dalam menghadapi pandemi, kreatif, serta mengedepankan kolaborasi di antara perempuan.

Kata Kunci: perempuan dan pandemi, pandemi Covid-19, kelentongan perempuan

¹Robertus Robet, ²Retna Hanani, ³Charine

(¹Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, ²Departemen Ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro, ³Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta; ^{1,3}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur; ²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudharto SH, Tembalang, Semarang)

Mempertahankan Ruang Kewargaan: Perempuan Aktivis dan Politik Spasial di Masa Pandemi Covid-19

Maintaining Civic Space: Women Activist and Spatial Politics During Pandemic Covid-19 in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 259-269, 1 tabel, 27 daftar pustaka

The Covid19 pandemic has changed society's spatial practices substantially. Large-scale social restrictions, lockdowns, and the obligation to wear masks have changed the way humans relates to each other personally and politically. This article discusses how the pandemic has shaped civic space of women activists and how women activists maintain and create citizenship space amid the pandemic and democratic regression. The data source of the article is collected through online survey of 20 female activists and in-depth online interviews. The results show that civil society organizations in Indonesia are under immense pressure due to pandemic and democratic regression. For civil society organizations, their space is limited by various legal regulations and various violence and stigma aimed at civil society activists. More than that, for women activists the pandemic also provides additional domestic burdens which make the space for women activists increasingly limited. In the midst of these obstacles, our research shows that women and civil society activists do not reduce their intensity in maintaining the civic space.

Key words: pandemic, civic space, spatial politics, democracy.

Pandemi telah mengubah praktik spasial masyarakat secara substansial. Pembatasan sosial berskala besar, *lockdown*, dan kewajiban memakai masker telah mengubah cara manusia membangun relasi intim maupun relasi kewargaan dan demokrasi. Artikel ini membahas tentang bagaimana pandemi mengubah ruang kewargaan (*civic space*) perempuan aktivis dan bagaimana mereka mempertahankan dan menciptakan ruang kewargaan ditengah pandemi dan regresi demokrasi. Sumber data artikel adalah survei elektronik 20 perempuan aktivis dan wawancara mendalam melalui medium daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) di Indonesia mengalami tekanan yang semakin berat.

Bagi organisasi masyarakat sipil, ruang gerak mereka dibatasi oleh berbagai peraturan hukum dan pelbagai kekerasan dan stigma yang ditujukan kepada aktivis *civil society*. Lebih dari itu, bagi perempuan aktivis, pandemi juga memberikan beban tambahan domestik yang membuat ruang gerak perempuan aktivis semakin terbatas. Di tengah hambatan-hambatan tersebut, penelitian kami menunjukkan bahwa perempuan aktivis dan *civil society* tidak mengurangi intensitas mereka dalam mempertahankan ruang kewargaan.

Kata kunci: gender dan pandemi, kepemimpinan perempuan, perkawinan anak perempuan, pandemi dan kekerasan terhadap perempuan, perempuan akar rumput.

Misiyah

(Institut KAPAL Perempuan Jl. Kalibata Timur Raya, No. 5
Jakarta Selatan 12740, Indonesia)

Urgensi Perspektif Gender dalam Mitigasi Pandemi Covid-19

The Urgency of Gender Perspectives in the Covid-19 Pandemic's Mitigation

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 271-282, 18 daftar pustaka

This paper looks at the urgency of gender perspective in Covid-19 pandemic's mitigation in Indonesia. This is crucial given the lack of gender perspective in measures to handle the pandemic in Indonesia and therefore deepening the existing gender inequality. This situation can be seen in the mitigation of the pandemic's impacts, particularly the specific impact of the pandemic on women within the gender cross-sectoral issues (economy, health, and education), and women's participation in the decision-making processes. Data during the pandemic show that the pandemic has caused serious impacts on women. Therefore, data and gender analysis are needed in order to ensure that measures in handling the pandemic would address the problems that are faced by women and vulnerable groups. This paper will present data from global and national, as well as data from KAPAL Perempuan's field experiences in its collaboration with its local partner organizations in 6 (six) provinces. The paper also draws from documentation from the experiences of other organizations in integrating gender perspective from the past natural disasters' mitigations that ever occurred in Yogyakarta, West Sumatra, Palu, and Lombok.

Keywords: gender and pandemic, women's leadership, pandemic and violence against women, grassroots women

Tulisan ini membahas urgensi perspektif gender dalam mitigasi pandemi di Indonesia. Ini penting dilakukan karena perspektif gender dalam penanganan pandemi di Indonesia masih minim dan mengakibatkan ketimpangan gender makin menajam. Hal ini dapat dirasakan pada penanganan dampak pandemi yang spesifik dialami perempuan pada isu-isu gender lintas sektoral (ekonomi, kesehatan, pendidikan), serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Data-data selama pandemi menunjukkan bahwa pandemi mempunyai dampak serius terhadap kehidupan perempuan. Oleh karena itu, data dan analisis gender dibutuhkan agar penanganan pandemi dapat menjawab masalah perempuan dan kelompok rentan lainnya. Tulisan ini akan mengungkap data global, nasional dan pengalaman lapangan dari Institut KAPAL Perempuan bersama organisasi mitra lokal yang selama ini bekerja sama secara intensif di 6 (enam) provinsi. Tulisan ini juga merujuk pada dokumentasi pengalaman beberapa pihak dalam mengintegrasikan perspektif gender untuk mitigasi bencana alam yang pernah terjadi di Yogyakarta, Sumatera Barat, Palu, dan Lombok.

Kata kunci: gender dan pandemi, kepemimpinan perempuan, perkawinan anak perempuan, pandemi dan kekerasan terhadap perempuan, perempuan akar rumput.

Andi Nur Faizah

(Rahima-Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan, JL. H. Shibi No. 70, RT. 007/01, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan)

Gerakan Perempuan Ulama Merespons Pandemi Covid-19 di Tengah Komunitas: Pengalaman Simpul Rahima

Women Ulema's Action Responding to Covid-19 Pandemic in their Communities: The Experience of 'Simpul Rahima'

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 283-294, 1 tabel, 1 gambar, 1 gambar, 19 daftar pustaka

This article raises the experience of female ulema's autonomy and strength in responding to the Covid-19 pandemic in their communities. The female ulema that is represented by Simpul Rahima in this article, refers to the female ulemas who have attended series of Female Ulema School, that are based in community, with gender equality perspective about Islam. Data collection is conducted through focused group discussion (FGD) and online observation. This study reveals that self-autonomy of the female ulema has distinct characteristic from those of male ulema. The female ulema's preach is based on women's real experience. Female ulema also utilize their authority politically to disseminate a peaceful, full of compassion and just Islamic teaching amidst religious interpretation which often marginalizes the position of women. In related with strength, female ulema utilize majelis taklim to preach a gender-just Islam as well as organize women's collective strength.

Keywords: female ulema, Covid-19 pandemic, women's autonomy

Tulisan ini mengangkat pengalaman otonomi dan kekuatan perempuan ulama dalam merespons pandemi Covid-19 di komunitas mereka. Perempuan ulama atau yang disebut dengan Simpul Rahima di dalam tulisan ini merujuk pada ulama dengan jenis kelamin perempuan yang telah mengikuti rangkaian Pendidikan Ulama Perempuan, memiliki basis di komunitas, serta memiliki perspektif Islam yang adil gender. Pengambilan data dilakukan melalui *focused group discussion* (FGD) dan pengamatan secara daring (*online*). Penelitian ini menemukan bahwa otonomi diri Simpul Rahima memiliki kekhasan yang berbeda dengan laki-laki ulama. Perempuan ulama mendakwahkan agama berbasis pengalaman riil perempuan. Perempuan ulama juga secara politis memanfaatkan otoritas yang dimiliki untuk menyebarluaskan ajaran Islam yang damai, penuh kasih sayang, dan berkeadilan bagi perempuan di tengah penafsiran agama yang kerap meminggirkan posisi perempuan. Terkait kekuatan, perempuan ulama menggunakan majelis taklim untuk mengajarkan Islam yang adil gender sekaligus mengorganisasi kekuatan kolektif perempuan.

Kata kunci: perempuan ulama, pandemi Covid-19, otonomi perempuan

¹Atnike Nova Sigit, ²Abby Gina, ³Dewi Komalasari

(^{1,2,3} Jurnal Perempuan & ¹Universitas Paramadina ^{1,2,3}Jl. Tanah Manisan 72, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur; ¹Jl. Gatot Subroto No. Kav 97, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan)

Potret Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perempuan dan Kelompok Marginal melalui Pendekatan Feminisme Interseksional

Portrait of the Impact of the Implementation of Large-Scale Social Distancing during Covid-19 Pandemic towards Women and Marginalized Groups through the Perspective of Intersectional Feminism

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020, hal. 295-308, 1 tabel, 37 daftar pustaka

Social distancing has been used as one of the methods to prevent the spreading of Corona virus during the Covid-19 pandemic. This method has been applied in many countries. In Indonesia, the social distancing method is implemented based on the Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), a large-scale social distancing policy. Through PSBB policy, a large number of activities in public domain must be closed and/or be restricted. Meanwhile, many of societal activities, such as schooling and working, must be held through long distance or being conducted at home. The application of social distancing has caused increasing of women's responsibilities on care work and house work in domestic domain. Through intersectional feminism's perspective, this article tries to elaborate the impact of the application of social distancing towards women and marginalized groups. This article found that the existing inequalities namely gender inequality, class inequality, and other forms of social inequality that have been experienced by women and the marginalized groups, have worsened their situations during the application of social distancing policy in Indonesia during the Covid-19 pandemic.

Key words: Covid-19 pandemic, intersectional feminism, social distancing, care work

Pembatasan jarak sosial (*social distancing*) adalah salah satu bentuk metode pencegahan penyebaran virus Corona di masa pandemi Covid-19. Metode ini dijalankan oleh berbagai negara. Di Indonesia, metode pembatasan jarak sosial ini dijalankan melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan penerapan PSBB maka sejumlah besar kegiatan di ruang publik harus ditutup dan/atau dibatasi. Sementara itu, sebagian besar aktivitas masyarakat, seperti bersekolah dan bekerja, harus dilakukan jarak jauh atau dilakukan di rumah. Penerapan pembatasan jarak sosial tersebut menyebabkan bertambahnya kegiatan rumah tangga, dan hal ini memperbesar tanggung jawab perempuan dalam kerja-kerja perawatan (*carework*) dan kerja rumah tangga (*housework*) di ranah domestik. Melalui perspektif feminisme interseksional, artikel ini mencoba memaparkan dampak penerapan pembatasan jarak sosial di Indonesia terhadap perempuan dan kelompok marginal. Artikel ini menemukan bahwa berbagai ketimpangan seperti ketimpangan gender, ketimpangan kelas, dan ketimpangan sosial yang selama ini dialami oleh perempuan dan kelompok marginal di dalam tulisan ini telah memperburuk situasi mereka di saat penerapan pembatasan jarak sosial dilakukan di Indonesia.

Kata kunci: pandemi Covid-19; feminisme interseksional; pembatasan jarak sosial; kerja perawatan

Potret Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perempuan dan Kelompok Marginal melalui Pendekatan Feminisme Interseksional

Portrait of the Impact of the Implementation of Large-Scale Social Distancing during Covid-19 Pandemic towards Women and Marginalized Groups through the Perspective of Intersectional Feminism

¹Atnike Nova Sгиro, ²Abby Gina, ³Dewi Komalasari

¹²³Jurnal Perempuan & ¹Universitas Paramadina

¹²³Jl. Tanah Manisan 72, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

¹Jl. Gatot Subroto No. Kav 97, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

¹atnike@jurnalperempuan.com, ²abby@jurnalperempuan.com, ³dewikoma@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 21 November 2020, direvisi 23 November 2020, diputuskan diterima 24 November 2020

Abstract

Social distancing has been used as one of the methods to prevent the spreading of Corona virus during the Covid-19 pandemic. This method has been applied in many countries. In Indonesia, the social distancing method is implemented based on the Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), a large-scale social distancing policy. Through PSBB policy, a large number of activities in public domain must be closed and/or be restricted. Meanwhile, many of societal activities, such as schooling and working, must be held through long distance or being conducted at home. The application of social distancing has caused increasing of women's responsibilities on care work and house work in domestic domain. Through intersectional feminism's perspective, this article tries to elaborate the impact of the application of social distancing towards women and marginalized groups. This article found that the existing inequalities namely gender inequality, class inequality, and other forms of social inequality that have been experienced by women and the marginalized groups, have worsened their situations during the application of social distancing policy in Indonesia during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Covid-19 pandemic, intersectional feminism, social distancing, care work

Abstrak

Pembatasan jarak sosial (*social distancing*) adalah salah satu bentuk metode pencegahan penyebaran virus Corona di masa pandemi Covid-19. Metode ini dijalankan oleh berbagai negara. Di Indonesia, metode pembatasan jarak sosial ini dijalankan melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan penerapan PSBB maka sejumlah besar kegiatan di ruang publik harus ditutup dan/atau dibatasi. Sementara itu, sebagian besar aktivitas masyarakat, seperti bersekolah dan bekerja, harus dilakukan jarak jauh atau dilakukan di rumah. Penerapan pembatasan jarak sosial tersebut menyebabkan bertambahnya kegiatan rumah tangga, dan hal ini memperbesar tanggung jawab perempuan dalam kerja-kerja perawatan (*carework*) dan kerja rumah tangga (*housework*) di ranah domestik. Melalui perspektif feminisme interseksional, artikel ini mencoba memaparkan dampak penerapan pembatasan jarak sosial di Indonesia terhadap perempuan dan kelompok marginal. Artikel ini menemukan bahwa berbagai ketimpangan seperti ketimpangan gender, ketimpangan kelas, dan ketimpangan sosial yang selama ini dialami oleh perempuan dan kelompok marginal di dalam tulisan ini telah memperburuk situasi mereka di saat penerapan pembatasan jarak sosial dilakukan di Indonesia.

Kata kunci: pandemi Covid-19; feminisme interseksional; pembatasan jarak sosial; kerja perawatan

Pendahuluan

Pada bulan Maret 2020 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan jarak sosial melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan

kebijakan untuk membatasi kegiatan tertentu penduduk di dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19, untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus. Pembatasan yang dilakukan setidaknya meliputi: diliburkannya sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/ atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Pasal 4, PP No.21/ 2020).

Pelaksanaan PSBB menyebabkan perubahan aktivitas dan menimbulkan beberapa persoalan di dalam masyarakat. Secara sosial, PSBB menyebabkan sebagian besar aktivitas masyarakat berpindah ke dalam rumah atau ranah domestik. Sementara secara ekonomi, penutupan berbagai sektor bisnis menyebabkan kontraksi terhadap sejumlah sektor bisnis, seperti bisnis ritel, restoran (Katadata.co.id 2020), salon kecantikan (bbc.co.id 2020), dan lainnya. Selain itu, PSBB juga menyebabkan kenaikan pada biaya konsumsi rumah tangga seperti listrik, bahan kebutuhan pokok, termasuk muncul kebutuhan paket data internet untuk bekerja dan bersekolah.

Perserikatan Bangsa-bangsa (UN 2020) menyebutkan luasnya dampak pandemi Covid-19 terhadap berbagai bidang, seperti kesehatan, ekonomi, bertambahnya beban kerja di dalam keluarga, bahkan juga meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender. Menurut PBB, ketimpangan gender yang telah berlangsung selama ini turut memperburuk dampak Pandemi Covid-19 terhadap perempuan. Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization /WTO* 2020) menyebutkan bahwa perempuan di Amerika Serikat dan Kanada menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Sementara itu, *Rapid Gender Assessment (RGA)* yang dilakukan oleh UN Women (2020) di Eropa dan Sentral Asia menemukan lebih dari 15 persen responden perempuan kehilangan pekerjaan, dan 41 persen mengalami pengurangan upah. RGA yang sama menemukan peningkatan jam dan beban kerja perempuan di dalam keluarga selama pandemi Covid-19. Maka pendekatan gender perlu menjadi arus utama di dalam penanganan pandemi Covid-19.

Lensa keadilan gender diperlukan untuk memastikan agar upaya dan kebijakan untuk menghadapi pandemi Covid-19 dapat menjawab kebutuhan perempuan. PBB telah mendorong setiap negara untuk memastikan agar penanganan dan pemulihan akibat pandemi Covid-19 mengikutsertakan perempuan, baik dari sisi partisipasi maupun pertimbangan-pertimbangan sosial dan ekonomi (UN 2020). Penempatan perempuan secara substantif dalam penanganan Covid-19 diperlukan tidak hanya karena perempuan merupakan salah satu kelompok yang menghadapi kerentanan besar, tetapi juga karena perempuan merupakan tulang punggung dari proses pemulihan di dalam komunitas (UN 2020).

Namun pendekatan gender saja tidaklah cukup untuk memahami situasi yang dihadapi oleh perempuan di masa pandemi Covid-19. UN Women (2020) menekankan pentingnya pengumpulan data gender serta kelindan

ketimpangan (*intersecting inequality*) yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Hal ini penting untuk menghindari eksklusi terhadap perempuan dan kelompok-kelompok marginal. UNDP (2020) juga menyebutkan pentingnya pengintegrasian perspektif feminisme interseksional dalam perumusan penanganan sosial dan paket-paket ekonomi dalam menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Penerapan pembatasan jarak sosial seperti PSBB membawa konsekuensi berbeda terhadap setiap orang dan/atau setiap kelompok. Dengan populasi yang beragam baik secara budaya, ekonomi, dan geografis, maka pendekatan feminismne interseksional dapat memotret keragaman efektivitas atau dampak dari kebijakan PSBB terhadap populasi yang beragam. Pendekatan interseksional dapat memotret keragaman konteks tersebut karena pendekatan ini menekankan pentingnya refleksi kritis yang mengungkapkan kompleksitas relasi dan interaksi antara gender, ras, kelas, dengan berbagai faktor sosial lainnya seperti usia, disabilitas, agama, dan lain sebagainya. Menurut Havinsky (2012), pendekatan interseksional dapat menangkap lebih jelas dampak terhadap suatu kebijakan terhadap populasi yang beragam, siapa yang diuntungkan, siapa yang tereksklusi, bahkan dirugikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka artikel ini akan menganalisis konsekuensi dari penerapan pembatasan jarak sosial (PSBB) terhadap perempuan dan kelompok marginal, dengan menggunakan pendekatan feminismne interseksional. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan pembatasan jarak sosial telah menyebabkan perubahan sosial dan ekonomi yang membawa beban lebih besar terhadap perempuan serta kelompok marginal. Selain itu, artikel ini juga akan menjelaskan kerentanan atau tantangan khusus yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok marginal yang diteliti.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara terstruktur kepada sejumlah individu dari beberapa kategori kelompok sosial. Penelitian ini tidak didesain untuk melakukan generalisasi bahwa gejala yang dialami oleh narasumber dari kelompok sosial yang diteliti sebagai gejala umum yang dialami oleh seluruh atau sebagian besar dari kelompok yang diteliti. Penelitian ini bertujuan menangkap situasi dan persoalan yang dihadapi perempuan dan kelompok marginal akibat pelaksanaan pembatasan jarak sosial (PSBB) di masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai beberapa kategori kelompok sosial, yaitu: ibu rumah tangga, pekerja rumah tangga (termasuk pekerja rumah tangga migran), perempuan nelayan, perempuan dengan disabilitas, minoritas gender, dan buruh perempuan. Narasumber yang diwawancara tidak hanya individu yang menjadi anggota kelompok yang dianalisis, tetapi juga orang-orang yang memiliki pengetahuan dan/ atau memiliki keterlibatan dengan kelompok sosial yang diwawancara, seperti aktivis, dokter, pakar, dan

pengurus organisasi. Kelompok sosial yang dipilih dalam penelitian ini tidak mewakili seluruh kelompok sosial berbasis gender. Kelompok sosial dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Jurnal Perempuan yang memperlihatkan dimensi interseksionalitas yang menyebabkan kerentanan dan/ atau penindasan berlapis terhadap perempuan dan kelompok marginal lainnya.

Gambaran umum narasumber penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Gambaran umum narasumber penelitian

Kelompok sosial	Inisial Samaran	Tempat tinggal	Latar belakang narasumber
Ibu rumah tangga	EM	Makassar - Sulawesi Selatan	Perempuan, IRT, dan aktivis perempuan.
	YUS	Banda Aceh - Aceh	IRT, aktivis organisasi perempuan
	ROM	Jabodetabek	IRT, pengurus organisasi perempuan kepala keluarga.
	RAM	Sumba Timur - NTT	Ibu rumah tangga, perempuan masyarakat adat.
	EU	Sumba Barat Daya – NTT	Perempuan, dokter.
Pekerja Rumah Tangga	AM	Jabodetabek	Perempuan, PRT, pengurus organisasi Serikat PRT.
	AI	Jabodetabek	Perempuan, IRT, pengurus/ aktivis organisasi PRT.
PRT Migran	AH	Jabodetabek	Perempuan, pengurus organisasi pekerja migran.
	ZA	Kuala Lumpur, Malaysia	Perempuan, aktivis hak-hak pekerja migran.
Perempuan Buruh	JUM	Jabodetabek	Perempuan, buruh, dan pengurus serikat buruh.
Perempuan nelayan	MAS	Kabupaten Demak – Jawa Tengah	Perempuan, nelayan, IRT, dan pengurus organisasi perempuan nelayan.
	SU	Jabodetabek	Perempuan, IRT, pengurus organisasi perikanan dan kelautan.
Perempuan dengan disabilitas	MUL	Jabodetabek	Perempuan dengan disabilitas, ibu rumah tangga, sekaligus aktivis hak-hak orang/ perempuan dengan disabilitas.
	HE	Jabodetabek	Perempuan dengan disabilitas, aktivis hak-hak orang/ perempuan dengan disabilitas
Minoritas gender	AR	Jabodetabek	Transpuan/ transgender, bekerja sebagai penata rias, pengurus organisasi transgender.
	AG	Jabodetabek	Perempuan, pengurus organisasi perempuan minoritas gender.

Sumber: data penelitian

Karena keterbatasan ruang gerak di masa pandemi, wawancara dilakukan secara jarak jauh melalui telefon. Wawancara dilakukan di bulan Oktober 2020. Narasumber dipilih melalui jaringan organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk isu-isu perempuan. Untuk melengkapi wawancara, penelitian ini juga mengumpulkan data-data atau informasi sekunder seperti laporan-laporan dan pemberitaan media terkait situasi pandemi Covid-19 secara daring.

Feminisme Interseksional dan lapisan penindasan terhadap perempuan

Kimberle Crenshaw, seorang feminis kulit hitam dari Amerika Serikat, mempopulerkan konsep feminism interseksional dengan membongkar pengabaian doktrin-doktrin feminism dan anti rasialisme terhadap pengalaman perempuan kulit hitam di Amerika. Menurut Crenshaw (1989), pendekatan yang memisahkan antara suatu basis ketimpangan atau posisi sosial sebagai

sebuah persoalan tunggal cenderung mengabaikan kelompok yang mengalami penindasan berlapis. Dalam konteks penindasan yang dialami oleh perempuan kulit hitam di Amerika, Crenshaw mengungkapkan bagaimana pengalaman perempuan kulit hitam tidak dapat dipahami hanya dengan melihat identitas atau posisi mereka hanya sebagai perempuan atau hanya sebagai kulit hitam. Seorang perempuan kulit hitam menurut Crenshaw, misalnya, mengalami diskriminasi rasial akibat identitasnya sebagai orang kulit hitam, dan mengalami perkosaan akibat identitas gendernya.

Melalui feminism interseksional, Crenshaw (1989) berusaha menjelaskan bagaimana sistem penindasan bekerja secara simultan terhadap perempuan terjadi baik secara struktural, politik, maupun representasi. Interseksionalitas struktural berusaha menjelaskan bagaimana struktur atau sistem seperti ras, kelas, dan gender bekerja secara simultan terhadap perempuan, dan menyebabkan penindasan terhadap perempuan. Sementara interseksionalitas politik menjelaskan bagaimana perempuan bukanlah identitas sosial yang homogen. Perempuan yang berada dalam kelompok sosial dominan, misalnya perempuan kulit putih dari kelas atas atau menengah, meski mengalami ketimpangan gender namun mereka memiliki priviliege tertentu. Sementara perempuan dari kelompok sosial subordinat, seperti perempuan kulit hitam dari kelas pekerja, akan cenderung lebih mengalami berbagai bentuk penindasan gender, kelas, dan ras sekaligus. Interseksionalitas representasi berusaha mendorong keterwakilan perempuan yang mengalami subordinasi ganda, seperti perempuan kulit hitam, karena interseksionalitas ketimpangan yang mereka alami cenderung membuat keberadaan mereka terabaikan.

Feminisme interseksional memberi perhatian terhadap perempuan di dalam berbagai posisi dan kelompok sosial. Namun, apakah yang dimaksud dengan kelompok sosial? Iris Marion Young (1988) menjelaskan beberapa cara pandang dalam melihat kelompok sosial. Pemikiran Marxis melihat kelas sebagai bentuk primer dari kelompok yang menjelaskan relasi struktural dengan basis ekonomi atau produksi, interaksi dan juga konflik. Di dalam kelas yang sama, seperti kelas buruh misalnya, ragam kelompok sosial juga akan ditemukan, misalnya "kelas menengah", "kelas buruh", bahkan "kelas bawah" (*underclass*). Pandangan lain mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan individu yang memiliki perasaan kesejarahan yang sama, identitas, keanggotaan, keterpisahan, rasionalitas, dan ekspresi yang dipengaruhi oleh ikatan seseorang dengan kelompoknya (Young

1988). Menurut Young (1988) kelompok sosial bisa terbentuk karena identitas yang sama seperti jenis kelamin, ras, etnis, orientasi seksual; tetapi bisa juga dibentuk karena asosiasi seperti serikat buruh, partai politik, organisasi, dan lainnya.

Analisis feminism interseksional mampu menangkap kompleksitas persoalan struktural tanpa menghilangkan berbagai pengalaman penindasan yang dialami oleh perempuan (Carastathis 2014). Berbeda dengan pendekatan kerentanan (*vulnerability*) yang berusaha mencari penyebab dari kerentanan, analisis interseksional memperluas pendekatannya dengan mengungkapkan bagaimana hierarki kekuasaan dan sistem yang timbal membentuk pengalaman kelompok rentan tertentu (Lokot & Avakyan 2020).

Beberapa penelitian terkait pandemi Covid-19 dengan pendekatan feminism interseksional menemukan tantangan berlapis yang dihadapi oleh perempuan dan juga pentingnya peran perempuan dalam situasi pandemi saat ini. Lokot dan Avakyan (2020) mengungkapkan temuan gejala tingginya infeksi Covid-19 di kalangan minoritas tertentu. Mereka mengungkapkan bagaimana di Amerika Serikat kelompok masyarakat Amerika keturunan Afrika mengalami dampak pandemi Covid-19 lebih besar akibat ketimpangan sosial dan ketimpangan kesehatan yang telah terjadi berpuluhan tahun – termasuk rendahnya akses mereka terhadap asuransi kesehatan. Selain itu, Lokot dan Avakyan (2020) juga mengungkapkan persoalan akses terhadap layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (KSR) di masa krisis, yang cenderung mengabaikan perempuan dengan disabilitas, remaja, maupun kelompok minoritas gender.

Sementara dalam studinya terhadap perempuan di New Zealand, Ai Sumihira (2020) mengungkapkan bahwa perempuan kulit berwarna dan perempuan suku Maori di Aotearoa New Zealand, ternyata memiliki peran penting dalam mendampingi komunitas Maori, yang memiliki kerentanan lebih besar terhadap penyakit infeksi dan pandemi dibandingkan dengan orang dari non-Maori. Menurut Sumihira, peran kelompok perempuan suku Maori ini belum banyak diketahui, bahkan suku Maori sendiri belum banyak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan di masa pandemi Covid-19.

Dalam konteks Indonesia, basis ketimpangan ras dalam penggunaan konsep feminism interseksional mungkin tidak muncul sebanyak kasus-kasus di Amerika. Namun, pendekatan feminism interseksional juga dapat digunakan untuk melihat sistem ketimpangan yang lain, seperti kelas, gender, dan budaya. Artikel ini memilih untuk menjelaskan beberapa kategori kelompok sosial

berbasis gender, dan beberapa kelompok marginal, dengan pertimbangan bahwa kelompok yang dipilih tersebut merupakan kelompok yang mengalami ketimpangan gender yang berkelindan dengan basis ketimpangan lainnya. Kelompok yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kelompok dengan identitas gender, kelas sosial dan ekonomi yang subordinat, seperti perempuan sebagai ibu rumah tangga (IRT), minoritas gender seperti transpuan (transgender yang mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan), dan/ atau LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender); serta kelompok marginal seperti buruh, nelayan, pekerja rumah tangga (PRT), pekerja migran, dan perempuan dengan disabilitas.

Dampak Penerapan Pembatasan Jarak Sosial di Ranah Domestik

Penerapan kebijakan pembatasan jarak sosial menyebabkan lokasi kegiatan individu berpindah dari ranah publik ke ranah domestik, yaitu rumah. Terpusatnya kegiatan anggota keluarga di rumah membawa implikasi terhadap ruang gerak individu di dalam rumah, serta beban kerja domestik yang umumnya menjadi tanggung jawab perempuan. Ibu rumah tangga, anak perempuan, dan juga pekerja rumah tangga (PRT) yang umumnya adalah perempuan, adalah kelompok sosial yang pada umumnya bertanggung jawab atas kerja-kerja domestik atau kerja-kerja perawatan (*carework*). Akibatnya, ranah domestik di masa pandemi Covid-19 juga menjadi semakin tidak ramah terhadap perempuan dan kelompok marginal.

Beberapa bentuk kegiatan yang bertambah di ranah domestik akibat penerapan PSBB di masa pandemi di antaranya adalah: bersekolah dengan metode daring, penggunaan teknologi berbasis internet, bekerja jarak jauh (*work from home*), dan pencegahan penularan virus atau penyakit. Berbagai bentuk kegiatan yang meningkat di masa pandemi tersebut dilakukan oleh sebagian besar narasumber penelitian ini sambil tetap melakukan rutinitas kerja-kerja rumah tangga yang telah dilakukan sebelum pandemi terjadi.

Ibu rumah tangga memiliki interseksionalitas yang kompleks, baik dari basis kelas, maupun identitas sosial lainnya. Meski penelitian ini meneliti beberapa kategori kelompok sosial, namun hampir semua narasumber yang diwawancara juga berperan sebagai ibu rumah tangga. Maka sebagian besar narasumber juga menghadapi membesarnya beban kerja rumah tangga akibat pembatasan jarak sosial tersebut.

Penelitian ini menemukan beberapa dampak dari penerapan PSBB terhadap ranah domestik. Secara umum penerapan PSBB menyebabkan bertambahnya beban kerja perawatan (*carework*) – seperti mengasuh anak, mengurus keluarga yang sakit, atau kerja rumah tangga (*housework*) – seperti membersihkan rumah dan memasak; yang selama ini menjadi tanggung jawab perempuan. Beberapa bentuk kerja rumah tangga yang sangat dirasakan oleh narasumber penelitian di masa pandemi ini di antaranya adalah: beban untuk mendampingi sekolah jarak jauh, beban pengelolaan ekonomi rumah tangga karena meningkatnya biaya konsumsi rumah tangga, dan juga stigma-stigma dan kekerasan terhadap kelompok marginal seperti transgender dan PRT.

Bertambahnya kerja-kerja perawatan di dalam rumah tangga

Kerja rumah tangga atau kerja domestik umumnya dilakukan oleh perempuan, yang pada umumnya dilakukan oleh ibu rumah tangga (IRT) dan pekerja rumah tangga (IRT). Kerja domestik oleh IRT merupakan bentuk kerja perawatan tanpa upah (*unpaid carework*), sementara PRT merupakan bentuk kerja rumah tangga yang berbayar. Sigiyo, Primaldi & Takwin (2018) melakukan survei terhadap IRT di 34 provinsi di Indonesia dan menemukan 78% responden IRT menyatakan bekerja lebih dari 12 jam setiap harinya. Jenis pekerjaan rumah tangga yang dilakukan di antaranya adalah: mencuci, berbelanja kebutuhan rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, mengurus keperluan sekolah anak, mengurus kebun/ halaman rumah, menghadiri kegiatan komunitas (RT/RW), dan melakukan perbaikan kerusakan di rumah. Ketika penerapan pembatasan jarak sosial memindahkan berbagai aktivitas di ruang publik ke dalam rumah tangga, maka dapat diasumsikan bahwa beban kerja perawatan bagi perempuan di ranah domestik akan bertambah besar.

Semua narasumber di dalam penelitian merasakan bertambahnya beban kerja perawatan bagi perempuan di masa pandemi. Bentuk beban yang dirasakan itu di antaranya adalah: mendampingi anak sekolah jarak jauh; frekuensi memasak dan menyediakan makanan yang bertambah; dan mengasuh anggota keluarga yang sakit di saat pandemi. Selain itu IRT juga harus memastikan bahwa biaya rumah tangga seperti listrik, paket data internet, biaya pengobatan, tetap mencukupi meski biaya konsumsi rumah tangga meningkat dan pendapatan keluarga menurun akibat pandemi.

YUS seorang IRT di Banda Aceh menjelaskan bertambahnya beban kerja yang harus dilakukannya di rumah di saat masa pandemi terjadi karena anak-anak beraktivitas penuh di rumah. Berikut penjelasan YUS:

“...beban pekerjaan bertambah dalam arti, sebelum pandemi anak-anak sekolah dari pagi sampai siang. Sedari (sejak) dulu saya tidak masak kalau siang, tapi karena pandemi jadi rutin memasak untuk pagi, siang, sore karena semua tinggal di rumah” (YUS 2020, wawancara, tanggal 2 Oktober)

YUS juga menjelaskan bahwa kerja rumah tangga, seperti memasak, juga terganggu karena di masa awal pandemi pasar-pasar sempat ditutup. Tutupnya pasar menyulitkan IRT untuk membeli kebutuhan pangan bagi keluarga.

Selama pelaksanaan PSBB sejumlah besar kantor dan perusahaan ditutup dan para karyawan atau pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dari rumah (*working from home*). Maka IRT yang juga bekerja (ibu bekerja/*working mother*) harus melaksanakan tugas-tugas rumah tangga sekaligus melakukan tugas-tugas kantor dari rumah.

EM adalah seorang IRT yang bekerja di LBH Apik di Makassar - Sulawesi Selatan, adalah seorang ibu bekerja. Bagi EM mengurus kerja rumah tangga sambil melakukan tugas kantor ternyata bukan hal yang mudah, apalagi ketika ia juga harus mendampingi anak yang belajar jarak jauh selama pelaksanaan PSBB. Berikut penuturan EM:

“Di samping harus menyelesaikan pekerjaan kantor, karena walaupun *work from home*, namun tidak semudah yang saya bayangkan, setengah mati juga; ada pekerjaan rumah tangga yang harus saya kerjakan. Pekerjaan rumah tangga yang sebelum pandemi bisa dikerjakan dengan santai, dan saya bisa memilih mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga ini atau tidak, tetapi pada saat pandemi saya merasa tidak ada pilihan lain. Kemudian harus membantu anak-anak belajar juga”. (EM 2020, wawancara, 6 Oktober).

Meski Indonesia kerap diidentifikasi sebagai negara maritim, namun masyarakat nelayan justru menjadi kelompok marginal di dalam masyarakat. Nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan, dan kebodohan. Namun, Dedi Adhuri – seorang akademisi di bidang Antropologi, menjelaskan bahwa nelayan sesungguhnya memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus seperti keahlian menangkap ikan, mengenali spesies ikan, dan pengolahan produk perikanan (Gina 2017).

Jika masyarakat nelayan merupakan kelompok marginal, maka perempuan nelayan adalah kelompok marginal dari kelompok masyarakat nelayan.

Marginalisasi perempuan nelayan dapat dilihat dari pandangan masyarakat yang menganggap profesi nelayan hanya sebagai profesi laki-laki. Akibatnya, secara sosial maupun secara profesional, perempuan nelayan cenderung tidak diakui keberadaannya. Pekerjaan mengolah hasil tangkapan ikan yang banyak dilakukan oleh perempuan nelayan pun cenderung tidak dianggap sebagai bagian dari profesi nelayan (Gina 2017). Masnuah, seorang pendiri organisasi perempuan nelayan menjelaskan praktik pengabaian terhadap keberadaan perempuan nelayan dengan sering tidak diakuinya profesi perempuan sebagai nelayan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Pratiwi 2017).

SU, seorang perempuan yang menjadi pengurus sebuah organisasi nirlaba yang bekerja untuk isu perikanan dan kelautan, menjelaskan beban ganda untuk mengelola rumah tangga dan sekaligus mencari nafkah yang dialami oleh perempuan nelayan. Di masa pandemi, beban ganda tersebut semakin besar karena bertambahnya tanggung jawab di dalam rumah seperti anak yang bersekolah jarak jauh dan suami yang tidak bisa pergi melaut. SU menjelaskan:

“Perempuan jadi mengalami frustrasi yaa karena situasi ini (pandemi). Kerja domestik di beberapa pesisir memang masih beban perempuan saja ya. Terlepas suami melaut atau tidak urusan rumah tangga dianggap hanya kerja perempuan saja. Selain memberi dampak ekonomi, situasi ini (pandemi) membuat para perempuan nelayan semakin rentan terhadap KDRT. Mereka jadi frustrasi, anak-anak sekolah *online*, kebutuhan paket data menjadi tinggi. Perempuan menjadi terhimpit situasi ini”. (SU 2020, wawancara, 6 Oktober)

Beban ganda perempuan nelayan yang semakin berat di masa pandemi juga diakui oleh MAS, seorang perempuan nelayan yang menjadi pengurus organisasi perempuan nelayan. Berikut penuturan MAS:

“Beban kerja rumah tangga jadi tambah. Karena ekonomi menjadi semakin sulit, perempuan nelayan jadi harus mencari pinjaman, hutang. Secara psikis beban mereka tentu sangat bertambah mengingat tidak ada pemasukan tetapi pengeluaran semakin tinggi. Perempuan tidak bisa membiarkan keluarganya kelaparan. Walaupun ada bantuan bahan pokok dari kelompok, itu hanya bisa bertahan beberapa hari di keluarga nelayan yang makannya banyak. Kemudian perempuan kembali harus memutar otak untuk menyambung hidup keluarga”. (MAS 2020, wawancara, 5 Oktober)

Dalam praktik yang dominan di dalam masyarakat yang patriarkis, perempuan adalah kelompok sosial yang bertanggung jawab atas pekerjaan di dalam rumah tangga. Teori feminism tentang eksplorasi

gender umumnya berkonsentrasi pada struktur keluarga yang patriarkis (Young 1988). Maka, perspektif gender memandang kerja rumah tangga sebagai bentuk relasi gender, dan bukan semata-mata pertukaran antara waktu yang digunakan untuk kerja upahan (*paid work*) dan kerja tak berbayar di dalam rumah tangga (*unpaid*) (Bianchi et al 2000). Selain itu, kerja pengasuhan dan rumah tangga, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar, cenderung dianggap rendah. Sehingga, profesi kerja-kerja domestik seperti IRT sering dianggap tidak memiliki nilai ekonomi, sementara kerja-kerja domestik berbayar seperti PRT, memiliki kerentanan yang besar dan dianggap bernilai upah yang rendah.

Peran pengasuhan bagi anak saat bersekolah jarak jauh

Pengasuhan anak merupakan salah satu kerja perawatan. Secara global, pengasuhan anak, termasuk mendampingi anak dalam pendidikan sekolah, lebih banyak menjadi tanggung jawab perempuan. Laporan yang diterbitkan oleh Overseas Development Institute (ODI 2016) menyebutkan bahwa di 37 negara (setara dengan 20% dari populasi global) 75 % pengasuhan anak dilakukan oleh perempuan.

Salah satu turunan dari kebijakan PSBB di masa pandemi Covid-19 adalah penerapan sekolah jarak jauh dengan metode daring. Sebagian besar narasumber penelitian ini melihat sekolah jarak jauh sebagai beban kerja tambahan bagi perempuan di dalam rumah tangga. Kegiatan bersekolah jarak jauh mengharuskan orang tua untuk mendampingi anak belajar dan mengakses internet. Selain itu, bersekolah jarak jauh juga membutuhkan keterampilan dan teknologi untuk berinteraksi jarak jauh dengan menggunakan internet.

Penerapan sekolah jarak jauh dengan metode daring yang menjadi beban kerja bagi para ibu di komunitas selama masa pandemi diakui oleh EM:

“...Kemudian harus membantu anak-anak belajar juga. Otomatis profesi guru yang belum pernah saya lakukan tiba-tiba harus saya jalani. Ternyata hal-hal tersebut juga dirasakan oleh perempuan-perempuan yang saya temui di komunitas.” (EM 2020, Wawancara, 6 Oktober).

IRT yang juga menjadi buruh dan tetap harus bekerja di pabrik, tetapi harus bertanggung jawab mendampingi anak bersekolah jarak jauh. JUM seorang perempuan yang juga menjadi aktivis buruh menjelaskan hal ini:

“Sejak kebijakan PSBB ini kan anak-anak buruh sekolah online di rumah. Nah ini banyak kendala, ada yang tidak punya HP, ada yang tidak punya pulsa, ada yang gagap teknologi dan kemudian berdampak pada psikologis si anak dan si ibu. Ada situasi di mana buruh perempuan harus tetap datang ke pabrik untuk tetap bekerja, dan sambil bekerja harus sering telefon dan memantau anaknya di rumah sudah mengerjakan tugas atau belum. Kalau buruh yang memiliki anak lebih dari satu, itu sangat repot”. (JUM 2020, wawancara, 3 Oktober)

Ketika anak harus bersekolah dari rumah, sering kali perempuan tidak memiliki kapasitas keterampilan untuk mendampingi anak belajar. Akses terhadap teknologi seperti penggunaan internet juga menjadi kendala yang dihadapi oleh perempuan.

ROM merupakan seorang ibu rumah tangga dan sekaligus aktivis di organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang tinggal di Bekasi. Menurut ROM, mendampingi anak saat sekolah jarak jauh bagi perempuan kepala keluarga merupakan beban yang berat, karena pada umumnya perempuan kepala keluarga adalah orang tua tunggal yang harus mencari nafkah. ROM memaparkan sebagai berikut:

“Dan itu dialami juga oleh anggota PEKKA yang secara sosial ekonomi mirip si mbak (PRT) yang bekerja di rumah saya. Jadi mereka sekarang harus berjuang menemani anaknya karena sebagian besar sekolah dari rumah, sementara si ibu PEKKA ini tetap harus mencari nafkah karena dia juga kepala keluarga”. (ROM 2020, wawancara, 2 Oktober).

Bagi perempuan nelayan, akses terhadap teknologi internet merupakan tantangan ketika anak bersekolah jarak jauh. MAS adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai nelayan di Kabupaten Demak - Jawa Tengah, yang juga menjadi pengurus organisasi perempuan nelayan memaparkan:

“Kalau ruang gerak perempuan semakin terbatas dan beban perempuan semakin bertambah. Dengan adanya pandemi, perempuan jadi harus mengasuh dan menunggu anak belajar. Dengan belajar daring ibu jadi harus menemani anak. Ini bagi mereka yang paham. Lalu untuk teknologi, tidak semua keluarga nelayan punya HP sehingga di antara mereka ada yang tetap sekolah langsung”. (MAS 2020, wawancara, 5 Oktober)

Peran pengasuhan yang identik dengan peran perempuan membuat perempuan cenderung berpikir tentang pihak lain yang diasuh. Penelitian ini menemukan pandangan menarik ketika mewawancara seorang narasumber IRT dengan disabilitas, yang justru memikirkan situasi anak dengan disabilitas ketika ditanya mengenai beban perempuan disabilitas. Peran produksi

afektif-seksual (*sex-affective production*) yang disebutkan oleh Ann Ferguson (dalam Young 1988) menjelaskan bagaimana perempuan ditempatkan sebagai penyedia pengasuhan emosional bagi anak dan laki-laki, serta kepuasan seksual bagi laki-laki. Menurut Ferguson, baik laki-laki maupun perempuan pada umumnya cenderung memandang bahwa tanggung jawab pengasuhan ada pada perempuan.

Dalam feminism tindakan moral kepedulian perempuan dikenal dengan istilah etika kepedulian (*ethic of care*) dengan beberapa tokoh pemikiran seperti Carol Gilligan dan Nel Nodding (Tong 2014). MUL, seorang IRT dengan disabilitas justru mengkhawatirkan kesulitan orang tua dalam mendampingi anak dengan disabilitas untuk bersekolah jarak jauh.

"Namun yang menjadi kompleksitas baru hingga menimbulkan tekanan tersendiri bagi perempuan sebagai IRT, adalah ketika dia bertanggungjawab untuk membimbing atau mendampingi anaknya (yang memiliki disabilitas) dalam proses belajar." (MUL 2020, wawancara, 7 Oktober)

Menurut MUL, tidak semua keluarga memahami cara mendampingi anak dengan disabilitas untuk belajar. Selain itu, setiap ragam disabilitas membutuhkan metode pendidikan yang berbeda dan tidak selalu bisa dilakukan dengan metode daring. Maka sekolah jarak jauh dengan metode daring di masa pandemi Covid-19, bagi IRT dengan anak penyandang disabilitas tentu menjadi beban tambahan.

Bertambahnya biaya konsumsi rumah tangga

Pemusatan aktivitas di dalam rumah telah mengakibatkan naiknya biaya konsumsi rumah tangga seperti biaya listrik, air, internet, bahan pangan, dan lainnya. Di masa pandemi, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyediakan subsidi untuk pelanggan listrik golongan 900 VA bersubsidi. Namun sebagian masyarakat pelanggan 900 VA mengeluhkan bahwa biaya listrik mereka tetap naik. PLN menjelaskan bahwa kenaikan tersebut terjadi karena subsidi hanya berlaku bagi pelanggan kategori subsidi. Kenaikan biaya listrik di masa pandemi naik karena di masa penerapan kerja (dan bersekolah) dari rumah atau *work from home (WFH)*, dengan rata-rata pemakaian listrik rumah tangga rata-rata naik 1-3% (Kompas.com 2020).

Narasumber YUS yang tinggal di Banda Aceh juga merasakan adanya kenaikan biaya listrik selama pandemi Covid-19.

"Bagi orang-orang yang disubsidi, (listrik) tidak terpengaruh karena digratiskan. Tapi bagi kami yang tidak terima subsidi, itu terasa naiknya, hampir dua kali lipat. Biasa bayar dua-tiga ratus ribu, sekarang hampir lima ratus ribu rupiah. Jadi memang selama pandemi ada bantuan bagi orang miskin, listriknya digratiskan. Tapi bagi yang lain malah jadi membengkak." (YUS 2020, wawancara, 2 Oktober)

Konsumsi bahan pokok rumah tangga, seperti beras, minyak, dan bahan pangan juga meningkat selama pelaksanaan PSBB. Kenaikan konsumsi bahan pokok rumah tangga juga menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh IRT, sementara harga bahan pokok juga mengalami kenaikan akibat gangguan pada stok barang, pasar yang ditutup, dan transportasi yang terbatas di masa pelaksanaan PSBB.

EM menjelaskan jumlah bahan pangan yang harus dimasak saat PSBB menjadi bertambah karena seluruh anggota keluarga beraktivitas penuh di rumah. Berikut penuturan EM:

"Pada saat semua orang harus di rumah, mau tidak mau ekonomi itu paling terasa. Bahan pokok, yang biasanya mereka masak untuk di rumah satu liter untuk satu hari, sekarang ini pada masa pandemi naik di mana mereka harus memasak beras dalam satu hari sebanyak dua liter." (EM 2020, wawancara, 6 Oktober).

Untuk meningkatkan daya tahan kesehatan keluarga, biaya kesehatan – khususnya untuk konsumsi pencegahan penyakit, juga bertambah. YUS misalnya, berusaha menemukan bentuk-bentuk vitamin atau nutrisi yang dapat mencegah penyakit yang terjangkau oleh keluarga. Demikian penuturan YUS:

"Tiap keluarga pasti beda-beda. Bagi kami, meskipun terbatas tapi bagaimana caranya kita usahakan agar bisa beli vitamin. Tapi kadang-kadang harganya mahal, apakah memang sejak dulu harganya sudah segitu atau karena sulit didapat. Kemudian karena semua orang berobat tradisional, jahe merah yang sebelumnya dua puluh ribu, sekarang jadi enam puluh ribu" (YUS 2020, Wawancara, 2 Oktober)

Di masa pandemi, orang-orang yang mengalami PHK atau kehilangan pekerjaan kemudian memilih untuk pulang ke kampung halaman mereka. Kementerian Tenaga Kerja memperkirakan 2,8 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut mengalami dampak pandemi Covid-19 (HealthGrid.id 2020). Sementara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) juga mencatat sebanyak 32.192 pekerja migran Indonesia yang pulang karena dampak dari Pandemi Covid-19 (Kompas.com 2020). Kepulangan kaum perantau akibat hantaman terhadap berbagai sektor bisnis dan usaha

ini juga menambah beban konsumsi rumah tangga di kampung halaman mereka.

Perempuan kepala keluarga atau orang tua tunggal, sebagai pencari nafkah utama keluarga, harus menanggung naiknya konsumsi rumah tangga, termasuk ketika ada keluarga yang pulang kampung karena PHK di masa pandemi. ROM seorang aktivis Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menceritakan situasi yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga sebagai berikut:

"Selain itu, keluarganya ibu-ibu PEKKA, entah adik atau anaknya, yang selama ini menjadi tulang punggung atau membantu ibunya, terkena PHK sehingga mereka harus kembali ke kampung. Dari bekerja di Jakarta, Surabaya, atau kota besar lain maupun yang pekerja migran, mereka kembali ke kampungnya, dan menjadi beban bagi si ibu PEKKA. Selain menghidupi dirinya, sekarang dia juga ketambahan keluarga besar yang baru pulang itu. Jadi memang cukup berat sekali." (ROM 2020, wawancara, 2 Oktober).

RAM adalah seorang perempuan Sumba, yang menjadi IRT dan aktif melakukan sosialisasi bagi komunitas di masyarakat adat di Sumba Timur – NTT. Menurut RAM, biaya konsumsi pangan sehari-hari tidak terlalu berpengaruh terhadap komunitas petani di wilayahnya. Menurut RAM masyarakat petani di wilayahnya masih memiliki lahan yang dapat menghasilkan bahan pangan untuk konsumsi keluarga. Namun pendapatan masyarakat adat dan petani di masa pandemi mengalami penurunan, karena para petani tidak dapat menjual hasil pertaniannya ketika pasar ditutup di saat penerapan PSBB. Sementara itu, perempuan penenun juga tidak dapat menjual hasil tenunannya ke pasar, atau harus menjual hasil tenunannya ke pengepul (*middlemen*) dengan harga miring. Sementara itu, RAM merasakan bahwa biaya konsumsi lain seperti listrik, dan juga kebutuhan paket data internet untuk anak bersekolah jarak jauh membuat biaya rumah tangga membesar. RAM menuturkan:

"Biaya internet untuk keperluan anak sekolah dari rumah, dan biaya listrik juga terasa sekali. Yang biasanya daya 900 watt saya isi 100 ribu cukup untuk satu bulan, tapi saat pandemi ini belum sampai satu bulan sudah habis karena semua beraktivitas di rumah. Pulsa listrik juga cepat habis mungkin karena saya kerja dari rumah membuat *booklet-booklet* sosialisasi informasi Covid itu." (RAM 2020, wawancara, 5 Oktober).

Penerapan PSBB juga membawa konsekuensi bagi keluarga nelayan. Saat pelaksanaan PSBB, pasar dan pabrik pengolahan ikan merupakan beberapa jenis usaha yang ditutup. SU, seorang pengurus organisasi hak-

hak nelayan menjelaskan akibat dari ditutupnya pasar dan pabrik pengolahan ikan terhadap perekonomian keluarga nelayan selama pelaksanaan PSBB:

"Perubahan pada tiap keluarga karena Covid tidak terhindarkan ya. Nyaris di semua pesisir, keluarga nelayan terdampak karena *lock down*. Yang paling mereka rasakan adalah pasar mati, daya beli masyarakat turun, banyak pabrik perikanan tutup. Oleh karena itu para nelayan ga tau mau jual tangkapan mereka ke mana. Contoh di Muara Angke, di Maret-April mereka melaut hasilnya cuma untuk ganti biaya bensin mereka. Untuk konsumsi mereka cuma bisa konsumsi makanan instan. Modal mereka saja tidak tertutupi. Ini yang mereka (nelayan pesisir kota) alami. Pada waktu itu syukur-syukur jika melaut dan hasilnya bisa untuk membeli bahan bakar berikutnya, jika tidak yaa mereka menumpuk hutang." (SU 2020, wawancara, 6 Oktober).

Tekanan berlapis terhadap kelompok Marginal

Selain bertambahnya beban kerja rumah tangga, beberapa kelompok marginal di dalam penelitian ini juga menghadapi tekanan berlapis di masa penerapan pembatasan jarak sosial. Penelitian ini menemukan munculnya stigma dan eksplorasi terhadap PRT. Selain itu, penelitian ini juga menemukan tekanan sosial di ranah domestik terhadap kelompok minoritas gender (LGBT).

Stigma dan eksplorasi terhadap Pekerja Rumah Tangga

Dalam masyarakat kapitalis semakin banyak perempuan memasuki kerja upahan. Menurut David Alexander (dalam Young 1988) kerja upahan perempuan pada umumnya merupakan bentuk-bentuk kerja feminin berbasis gender. Kerja upahan berbasis gender yang dikerjakan oleh perempuan umumnya tidak lepas dari stereotip tentang peran gender perempuan, seperti kerja seksual, pengasuhan, perawatan orang lain, atau kerja yang menekankan pendekatan personal. Kerja upahan berbasis gender yang umumnya dilakukan perempuan tetap dibangun atas dasar asumsi bahwa perempuan secara alamiah adalah pengasuh dan pekerja domestik (Romero 2000). Romero menyebutkan kerja domestik atau kerja perawatan berbayar juga sering disebut dengan istilah industrialisasi kerja rumah tangga (*industrialized housework*). Salah satu kerja rumah tangga upahan adalah profesi pekerja rumah tangga (PRT).

Selain IRT, PRT merupakan penanggung jawab utama dalam kerja rumah tangga. Berbeda dengan IRT, PRT melakukan kerja perawatan upahan (*paid carework*). Namun profesi PRT di Indonesia masih dianggap rendah,

dengan upah di bawah upah minimum dan relasi kerja yang tidak pasti. Menurut Lita Anggraini, seorang aktivis hak-hak PRT, profesi PRT menghadapi bias kelas dan bias gender baik di ranah domestik oleh majikan, dan juga di ranah publik di kalangan legislator, yang menganggap bahwa PRT adalah pekerjaan dengan nilai upah rendah (Pratiwi 2017).

AM, salah satu narasumber penelitian yang berprofesi sebagai PRT, mengungkapkan bertambahnya beban kerja PRT di masa pandemi, terutama karena penerapan PSBB. Penerapan PSBB telah menyebabkan jumlah individu dan jam aktivitas anggota keluarga di dalam rumah semakin panjang. AM yang bekerja secara pulang pergi menjelaskan sebagai berikut:

"Biasanya (sebelum pandemi) masak itu hanya sore hari. Kalau sekarang (selama pandemi) saat datang pagi langsung disuruh masak. Saat mau pulang di sore hari disuruh masak lagi. Saat menjelang hari libur harus menyediakan stok makanan. Kemudian bersih-bersih rumah sehari-hari, kan karena anak semua pada kumpul, jadi rumah berantakan, giliran mau pulang harus nyapu ngepel lagi." (AM 2020, wawancara, 2 Oktober)

Meski beban pekerjaan PRT akibat PSBB semakin besar, namun PRT tidak mendapatkan penambahan upah, karena alasan kondisi ekonomi sang majikan menurun akibat pandemi. AM memaparkan hal ini sebagai berikut:

"Banyak teman-teman PRT yang mengeluh di grup WA, kerjaannya lebih banyak karena semua orang bekerja dari rumah. Biasanya pulang setengah hari (siang hari), kalau sekarang pulangnya bisa sore dan gak ada tambahan upah" (AM 2020, wawancara, 2 Oktober)

Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran Indonesia juga mengalami perubahan beban kerja di dalam rumah. AH, seorang narasumber yang juga aktif dalam advokasi perlindungan pekerja migran menjelaskan:

"Sejak COVID-19, teman-teman PRT migran beban kerjanya tambah banyak, karena majikannya juga tinggal di rumah. Jadi tentu beban pekerjaannya jadi banyak, jam kerjanya makin panjang, hari liburnya juga gak ada, karena Covid-19 dan situasi kerja yang banyak." (AH 2020, Wawancara 1 Oktober)

Di masa pandemi Covid-19, PRT migran justru harus menghadapi kerentanan seperti pemotongan upah, pemutusan hubungan kerja, dipulangkan, dan gagal diberangkatkan karena Pandemi Covid-19. Sejak Maret hingga Agustus 2020, tercatat setidaknya sekitar 176

ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan ke tanah air (Liputan6 2020).

"Teman-teman PRT ada yang digaji tidak penuh dan bahkan ada yang tidak digaji sama sekali karena majikan mereka terdampak pandemi Covid-19 ini. Jadi itu juga memengaruhi, sehingga mereka tidak bisa kirim uang ke rumah, mau pulang juga tidak bisa karena di negara tersebut ada kebijakan *lockdown* atau pengurangan mobilitas." (AH 2020, Wawancara 1 Oktober)

Pandemi Covid-19 juga memengaruhi ruang gerak PRT. Di masa pandemi Covid-19, PRT yang tinggal bekerja di rumah majikan tidak bisa pulang ke rumah atau ke kampungnya karena sang majikan takut sang PRT membawa virus ketika kembali dari kampung halaman. Di masa pandemi Covid-19, PRT juga rentan terhadap stigma sebagai penular virus Covid-19. AM menceritakan sebagai berikut:

"...tapi kalau anggota SPRT Jakarta Sapu Lidi itu ada yang kerja sama orang *expat* (warga negara asing). Kemudian PRT-nya sempat demam atau sakit biasa. Tapi sama majikannya sudah dicurigai macam-macam: '*kamu dapat virus dari tukang sayur, pas kamu belanja di supermarket*'. Tapi ternyata sakitnya cuma sehari dan sembuh. Kemudian disuruh *rapid-test* hasilnya nonreaktif. Beberapa hari kemudian, majikannya menjalani *swab* sekeluarga, ternyata majikan perempuannya positif tanpa gejala" (AM 2020, wawancara 2 Oktober)

Tekanan terhadap Minoritas Gender di Ranah Domestik

Di dalam masyarakat yang hanya menerima heteroseksualitas sebagai satu-satunya orientasi seksual, dan identitas gender biner yang ada hanya laki-laki dan perempuan, maka kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dianggap sebagai suatu kondisi menyimpang. Anggapan menyimpang ini dibuat atas dasar berbagai landasan, baik moral, agama, maupun pandangan politik. Kelompok LGBT banyak mengalami intoleransi, diskriminasi, pelecehan, dan ancaman karena orientasi seksualnya. Karenanya, LGBT kemudian dimasukkan ke dalam kelompok minoritas berdasarkan orientasi seks dan identitas gender (Subhrajit 2014).

Tak hanya rentan terhadap kekerasan, kelompok minoritas gender (LGBT) juga mengalami diskriminasi dan terkucil di bidang-bidang lain, seperti dalam ketenagakerjaan, pendidikan, bahkan dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Chatterjee Subhrajit (2014) menyebutkan setidaknya ada 76 negara yang memberlakukan hukum yang diskriminatif yang mengriminalkan minoritas gender dengan ancaman

tahanan, persekusi, bahkan 5 negara di antaranya menerapkan hukuman mati.

Indonesia merupakan masyarakat yang beragam secara kultural, termasuk sikap terhadap keberagaman gender dan seksualitas. Kultur yang beragam ini juga muncul dalam sikap keluarga terhadap anggota keluarganya yang memiliki identitas gender minoritas. Laporan yang diterbitkan oleh UNDP dan USAID (2014) mengenai situasi minoritas gender di Indonesia menyebutkan keluarga merupakan hambatan terbesar bagi kelompok LGBT untuk dapat mengekspresikan keberadaan diri mereka secara penuh. Sebagian keluarga, meski tidak mudah pada awalnya, dapat menerima keberadaan LGBT di dalam keluarga. Sementara sebagian keluarga lain bersikap negatif, bahkan melakukan kekerasan.

Di masa pandemi Covid-19, jenis-jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh kaum transpuan/transgender/waria mengalami hantaman yang cukup besar. Ketua Sanggar Seroja, Rikky Muhammad Fajar, menyebutkan kepada bbc.com (2020) bahwa pandemi telah menyebabkan kelompok transgender kehilangan pendapatan hingga 70%. Hilangnya pendapatan menyebabkan para transgender tidak mampu membayar sewa rumah dan kemudian memilih tinggal di rumah singgah atau pulang ke rumah keluarga.

Transgender yang tinggal di rumah singgah atau berbagi rumah sewa dengan transgender lain akan menghadapi ancaman penularan virus Corona yang tinggi. Sementara transgender yang memilih untuk pulang ke rumah keluarga rentan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). AG salah satu narasumber yang merupakan aktivis hak-hak minoritas gender mengungkapkan sebagai berikut:

"Orang tua biasanya tetap menerima kepulangan anak LBThya (Lesbian Biseksual Transgender) saat pandemi. Hanya saja mereka biasanya menjadi tumpuan kemarahan. Misal disalah-salahin seperti '*lo sih lesbian jadi ga bisa dapet kerjaan yang benar, jadi bahan malu di tetangga*'. Semacam itu. Covid membuat para LBT harus kembali ke rumah dan menerima kekerasan berbasis SOGIE (*Sexual Orientation Gender Identity and Expression*) kembali." (AG, 2020, wawancara, 10 Oktober)

AG menjelaskan, umumnya kelompok minoritas gender (LGBT) memilih meninggalkan rumah untuk menghindari KDRT karena identitas gender mereka. Namun hilangnya pendapatan akibat pandemi mengharuskan sebagian dari mereka kembali ke rumah. Menurut AG, kelompok minoritas gender mengalami KDRT ketika pulang ke rumah karena dua hal, pertama

karena identitas gender mereka, dan kedua karena mereka dianggap menambah beban ekonomi keluarga yang semakin berat di saat pandemi.

Narasi pengalaman kelompok minoritas gender ini merupakan panggilan bagi masyarakat dan juga pembuat kebijakan untuk sensitif terhadap suara liyan. Sebab jika pengalaman mereka tidak disuarakan dan direkognisi, maka mereka akan semakin rentan mengalami ketidakadilan dan pengabaian. Perlu dipahami bahwa kategori sosial sebagai LGBT ternyata berdampak pada marginalisasi berlipat pada kelompok tersebut.

"Kawan LBT Makasar ada yang cerita, mungkin karena gender ekspresi kita, RT tidak mau memberikan bansos... Soal lain adalah ketika LBT adminduknya lengkap tapi bansos tidak diberikan oleh pejabat setempat karena ekspresi gendernya, ini di daerah Makasar dan Jakarta. Kadang di tingkat RT juga ada nepotisme yaa, yang diberikan bantuan hanya kelompoknya, masalah beda agama saja tidak berikan bansos (bantuan sosial)" (AG, 2020, wawancara, 10 Oktober).

Kutipan-kutipan di atas menunjukkan bahwa LBT mengalami subordinasi di dalam keluarga dan masyarakat. Dengan matra interseksional, tampak bahwa identitas sosial yang berbeda berdampak pada bagaimana ketimpangan beroperasi di masyarakat. Pendekatan ini penting untuk merefleksikan bagaimana kelompok-kelompok identitas tertentu (minoritas) mengalami kerentanan dan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dengan memberikan perhatian pada relasi kuasa, kita dapat memahami bahwa kelompok masyarakat tertentu mengalami resistensi dari lingkungan sekitarnya (Ferree 2015). Pendekatan interseksional penting untuk dilakukan guna menumbuhkan desakan untuk diakuinya keragaman pada seluruh aspek sosial budaya.

Penutup dan Kesimpulan

Penerapan kebijakan pembatasan jarak sosial telah memindahkan sejumlah besar kegiatan masyarakat dari ruang publik ke dalam rumah atau ranah domestik. Penelitian terhadap perempuan dan kelompok marginal di dalam artikel ini memperlihatkan adanya konsekuensi negatif dari pemusatkan kegiatan ke ranah domestik tersebut terhadap perempuan dan kelompok marginal yang diteliti.

Penelitian ini menemukan bahwa perempuan dan kelompok marginal yang diwawancara merasakan bertambah besarnya tanggung jawab perempuan dalam kerja pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga di masa

pandemi Covid-19. Penerapan PSBB menyebabkan seluruh aktivitas keluarga terkonsentrasi di rumah sepanjang hari, dan mengakibatkan tekanan terhadap sektor usaha dan bisnis yang mengguncang ekonomi keluarga. Kombinasi dari ketimpangan gender, posisi marginal dari kelompok sosial, perubahan pola kegiatan keluarga semasa penerapan PSBB, serta tekanan terhadap perekonomian keluarga, seluruhnya memperlihatkan interseksionalitas yang menyebabkan bertambah beban perempuan, khususnya dalam kerja pengasuhan dan kerja rumah tangga, di ranah domestik.

Pertama, karena peran gender yang bias terhadap perempuan sebagai penanggung jawab kerja perawatan (*carework*) dan kerja-kerja rumah tangga (*housework*), maka beban kerja perempuan di ranah domestik selama pelaksanaan PSBB menjadi lebih besar dari masa sebelum pandemi. Beban kerja tambahan yang muncul akibat penerapan PSBB di antaranya adalah: beban kerja rumah tangga seperti memasak, mengurus rumah, semakin besar karena sebagian besar kegiatan anggota keluarga dilakukan di rumah.

Selain itu, PSBB juga menyebabkan beban pengasuhan anak yang menjadi tanggung jawab perempuan juga semakin besar akibat penerapan sekolah jarak jauh dengan metode daring. Beban pengasuhan sekolah jarak jauh bagi perempuan tidak semata-mata menjadi beban dalam arti waktu kerja. Perempuan juga menghadapi persoalan rendahnya akses terhadap teknologi, baik karena alasan ekonomi maupun alasan keterampilan dalam penggunaan teknologi.

Selain beban kerja rumah tangga, perempuan juga harus menghadapi kerentanan ekonomi keluarga di masa pandemi. Selama pelaksanaan PSBB banyak pekerja mengalami PHK dan pengurangan upah. PRT dan PRT migran juga menghadapi ancaman PHK dan pengurangan upah. Sementara krisis ekonomi juga dialami oleh sektor ekonomi informal seperti yang dialami oleh perempuan penenun tradisional, transpuan di salon-salon kecantikan, dan lainnya.

Beban kerja IRT dan PRT dalam rumah tangga selama penerapan PSBB menjadi lebih besar. Di masa pandemi Covid-19 PRT rentan mengalami eksplorasi karena beban kerja tambahan tanpa kompensasi tambahan upah. Selain eksplorasi kerja, PRT juga rentan mendapatkan stigma negatif sebagai penyebar virus Covid-19.

Penerapan PSBB membawa konsekuensi negatif terhadap perempuan dan kelompok marginal yang secara sosial telah mengalami berbagai ketimpangan. PRT domestik maupun PRT migran, merupakan salah satu

kelompok marginal yang mengalami kerentanan khusus akibat posisi sosialnya yang marginal. Marginalisasi posisi perempuan PRT merupakan refleksi dari subordinasi terhadap kerja pengasuhan dan kerja rumah tangga sebagai kerja berbasis gender yang memiliki nilai rendah.

Dalam penerapan PSBB di masa pandemi, kelompok marginal cenderung mengalami multi marginalisasi. Di masa pandemi Covid-19 sektor-sektor ekonomi yang digeluti oleh kelompok transgender banyak mengalami hantaman krisis, akibatnya marginalisasi ekonomi yang selama ini telah dialami oleh kelompok transgender, semakin memburuk. Hal ini semakin diperburuk ketika para transgender pulang ke rumah dan mengalami KDRT akibat identitas gendernya dan sekaligus dianggap menambah beban ekonomi keluarga yang telah dihimpit oleh pandemi.

Pembatasan jarak sosial melalui kebijakan PSBB membawa konsekuensi kepada seluruh masyarakat. Namun, perspektif feminismisme interseksional dalam penelitian ini telah mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok marginal yang mengalami tantangan lebih besar akibat penerapan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang meluas. Di dalam konstruksi masyarakat yang patriarki, formulasi kebijakan publik yang ada cenderung melupakan kelindan dari ketimpangan gender, kelas, dan sosial yang ada.

Tulisan ini menawarkan setidaknya dua langkah yang perlu dilakukan dalam menjawab kebutuhan perempuan dan kelompok marginal dalam agenda menghadapi pandemi Covid-19. Pertama, setiap kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan kelindan ketimpangan di dalam masyarakat, yang menyebabkan subordinasi berlapis perempuan dan kelompok marginal. Kedua, agenda strategis untuk mendekonstruksi feminisasi kerja-kerja domestik, seperti kerja pengasuhan dan kerja rumah tangga yang melanggengkan ketimpangan gender di dalam masyarakat, perlu untuk dilanjutkan. Sehingga setiap upaya atau kebijakan dalam situasi bencana dapat mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin luput dalam formulasi kebijakan, dan senantiasa memastikan kemanfaatan yang inklusif.

Daftar Pustaka

- Bianchi et al 2000, "Is Anyone Doing the Housework?", *Social Force*, September 2000, 79(1):191-228, diakses pada 16 November 2020, <https://www.semanticscholar.org/paper/Is Anyone Doing-the-Housework-Trends-in-the-Gender-Bianchi-Milkie/b1c63b19fc5cf5b020b31960489709d74644fed4>
- Bianchi et al 2012, "Housework: Who Did, Does or Will Do It, and How Much Does It Matter?", *Social Forces*. 2012 September 1;91(1):

UKEwjEi8ux0-bsAhVM8XMBHSEAwUQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Freliefweb.int%2Fsites%2Freliefweb.int%2Ffiles%2Fresources%2FPNUD_GENERO_COVID19__ENG_FINAL_3.pdf&usg=AOvVaw1arvnImfzMdvHtvifP_vdF

Young, I.M 1988, "Five Faces of Oppression", *The Philosophical Forum*, Volume XIX, No.4, Summber, 1988, diakses pada 10 November 2020, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis0OKalPbsAhWJH7cAHVsGC1sQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fstatic1.squarespace.com%2Fstatic%2F58f36d7c1e5b6cb8c0d88151%2Ft%2F5b819893aa4a996cc7a040d0%2F1535220047033%2FYOUNG%2BFive%2BFaces%2Bof%2BOppression.pdf&usg=AOvVaw1zLfKXswNx5mrjNe9Z8tCV>

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diakses 2 November 2020, <https://covid19.go.id/p/regulasi/pps-no-21-tahun-2020-tentang-psbb-dalam-rangka-penanganan-covid-19>

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diakses 18 November 2020, <https://covid19.go.id/p/regulasi/pergub-dki-jakarta-nomor-33-tahun-2020>

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi, diakses 18 November 2020, <https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/24640>

Kisi-kisi Pelaksanaan PSBB – Jakarta, 14 Mei 2020, diakses 18 November 2020, <https://covid19.go.id/p/regulasi/kisi-kisi-pelaksanaan-psbb-dki-jakarta-14-mei-2020>

Berita

Bbc.com 2020, "Transgender: Perjuangan Transpuan di Masa Pandemi Virus Corona - 'Hidup seperti orang yang mati perlahan-lahan'" 2020, [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52500732), 2 Mei 2020, diakses pada 18 November 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52500732>

HealthGrid.id 2020, "Termasuk 15 Juta Orang Kena PHK Akibat Corona, Sopir Bus Ini Terpaksa Jalan Kaki dari Jakarta ke Solo" 2020, [HealthGrid.id](https://health.grid.id/read/352160052/termasuk-15-juta-orang-kena-phk-akibat-corona-sopir-bus-ini-terpaksa-jalan-kaki-dari-jakarta-ke-solo?page=all), 20 Mei, diakses 18 November 2020, <https://health.grid.id/read/352160052/termasuk-15-juta-orang-kena-phk-akibat-corona-sopir-bus-ini-terpaksa-jalan-kaki-dari-jakarta-ke-solo?page=all>

Katadata.co.id 2020, "PSBB Pukul Bisnis Retail dan Restoran, Dampaknya ke Ekonomi Kuartal IV" 2020, [Katadata.co.id](https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f6c41a5972b0/psbb-pukul-bisnis-retail-dan-restoran-dampaknya-ke-ekonomi-kuartal-iv), 24 September, diakses 18 November 2020, <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f6c41a5972b0/psbb-pukul-bisnis-retail-dan-restoran-dampaknya-ke-ekonomi-kuartal-iv>

Kompas.com 2020, "Cara Pengusaha Salon Bertahan dari Badai Pandemi" 2020, [Kompas.com](https://lifestyle.kompas.com/read/2020/05/18/191400220/cara-pengusaha-salon-bertahan-dari-badai-pandemi?page=all), 18 Mei, diakses pada 18 November 2020, <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/05/18/191400220/cara-pengusaha-salon-bertahan-dari-badai-pandemi?page=all>

Kompas.com 2020, "Warganet Keluhkan Tarif 900 VA Naik, Ini Penjelasan PLN" 2020, [Kompas.com](https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/02/070700265/warganet-keluhkan-tarif-900-va-naik-ini-penjelasan-pln?page=all), 2 Mei 2020, diakses pada 16 November 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/02/070700265/warganet-keluhkan-tarif-900-va-naik-ini-penjelasan-pln?page=all>

Kompas.com 2020, "Dirut Bulog Akui Harga Sembako Mulai Akibat Wabah Covid-19" 2020, [Kompas.com](https://money.kompas.com/read/2020/04/20/143037126/dirut-bulog-akui-harga-sembako-mulai-mahal-akibat-wabah-covid-19), 20 April, diakses 18 November 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/04/20/143037126/dirut-bulog-akui-harga-sembako-mulai-mahal-akibat-wabah-covid-19>

Kompas.com 2020, "31.192 Pekerja Migran Kembali ke Indonesia karena Pandemi Corona" 2020, [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/11532311/32192-pekerja-migran-kembali-ke-indonesia-karena-pandemi-corona?page=all), 30 Maret 2020, diakses 18 November 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/11532311/32192-pekerja-migran-kembali-ke-indonesia-karena-pandemi-corona?page=all>

Liputan6.com 2020, "176 Ribu Pekerja Migran Indonesia Dipulangkan Selama Pandemi Covid-19" 2020, [Liputan6.com](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4348439/176-ribu-pekerja-migran-indonesia-dipulangkan-selama-pandemi-covid-19), 5 September, diakses pada 18 Oktober 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4348439/176-ribu-pekerja-migran-indonesia-dipulangkan-selama-pandemi-covid-19>

UN Women 2020, "Intersectional feminism: what it means and why it matters right now" 2020, [UN Women](https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/explainer-intersectional-feminism-what-it-means-and-why-it-matters), 1 Juli, diakses 18 Oktober 2020, <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/explainer-intersectional-feminism-what-it-means-and-why-it-matters>

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California)
2. Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
3. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
4. Elizabet Repelita Kuswijayanti, M.Si (Indonesia)
5. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
6. Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
7. Mariana Amiruddin

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH

JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminism dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pimpinan Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

